



LAPORAN KINERJA BBRSEKP

TW I 2026

Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan riset Dan SUMber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Baai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2026



LAPORAN KINERJA BBRSEKP

TW I 2026

Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan riset Dan SUMber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Baai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2026



Tim Penyusun

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan

(Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si)

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monitoring Evaluasi

(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Nurma Yunita D

Edwin Yulia Setyawan

Retno Erlina Rahmawati

Dedi Prayitno

Rizky Hendriansyah

Kontributor

Sub Bagian Umum

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan

Ketua Tim Kerja Kehumasan, Data dan Informasi

Ketua Tim Kerja Analisis Sosial Ekonomi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) triwulan I tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode triwulan I tahun 2026, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

BBRSEKP pada tahun 2026 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode triwulan I tahun 2026 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2026 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama triwulan I tahun 2026. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 20 April 2026

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

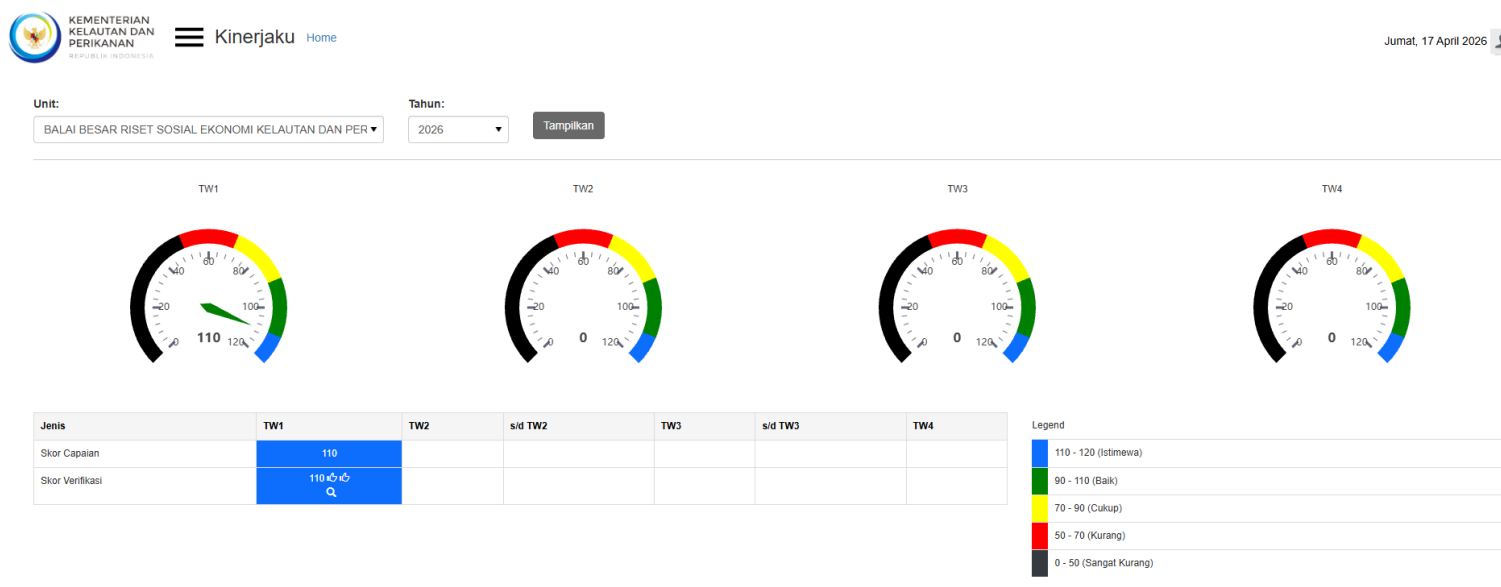
Dr. Novi Susetyo Adi, S.T., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang triwulan I tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan, dan implementasikan SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada tahun 2026.

Pada tahun 2026, BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp8.906.072.000 guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada tahun 2026 sebesar **110,00 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW I Tahun 2026



Selama triwulan I tahun 2026 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru) dan 1 IK berstatus baik (hijau) serta 7 IK baru akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi 2 IK tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 86% dan capaian sebesar 86% atau sama dengan 100%;

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja pada triwulan I tahun 2026, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp2.324.953.369,- relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.906.072.000,-. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 26,11% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“ISTIMEWA”**, yaitu dari SK “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan” dengan persentase capaian 120,00%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dalam rangka mendorong peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRSEKP secara berkala perlu dilakukan melalui penguatan pengendalian kinerja dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi pada triwulan berikutnya.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun. 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Capaian TW I Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii

Bab I Pendahuluan **1**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Keragaan SDM	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan	8

Bab II Perencanaan Kinerja **12**

2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Pengukuran Kinerja	17

Bab III Akuntabilitas Kinerja **18**

3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2026	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.3. Realisasi Keuangan	44
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP	46

Bab IV Penutup **48**

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	50

Lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Penghargaan BBRSEKP

Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP TW I Tahun. 2026	Viii
2	Rencana Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2026	14
3	Perjanjian Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2026	16
4	Capaian Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2026	19
5	Capaian IK Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	20
6	Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	
	Perbandingan Capaian IK 2 K/L BBRSEKP dengan satker sejenis	
7	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	23
8	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	24
9	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	24
10	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	24
11	Capaian IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	24
13	Capaian IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	27
15	Capaian IK Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	30
18	Perbandingan Capaian IK 5 dengan satker Pusat Diklat SDM KLHK	33
19	Capaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	35
23	Capaian IK 8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	40
24	Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBP2BKP	41
25	Capaian IK 9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	42
27	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2025	44
28	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025	44
29	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2025	45
30	Capaian Efisiensi Anggaran BBRSEKP Tahun 2025	48
31	Rincian Target Dan Realisasi Atas 9 IK Tahun 2025	49

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2025	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	4
3	Rincian ASN BBRSEKP	5
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	5
5	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2025-2029	13
6	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2026	13
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1	23
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	27
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	29
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	32
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	34
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	37
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	39
14	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	41
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	43
16	Capaian Kinerja pada <i>Dashboard</i> Kinerja BBRSEKP Tahun 2026	48





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan disebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2025, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp8.081.921.000,- dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2025 tanggal 25 November 2025 dengan kode digital stamp DS:5269-8867-2907-4310 (Revisi 08).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja tahun 2025 lebih banyak menginformasikan kegiatan manajerial, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP tahun 2026 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit kerja di lingkungan BPPSDMKP, memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis riset di bidang kelautan dan perikanan. BBRSEKP berfungsi sebagai penyedia rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) melalui pelaksanaan riset sosial ekonomi yang komprehensif, integratif, dan aplikatif.

Dalam mendukung BPPSDM, BBRSEKP berkontribusi pada penguatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyediaan hasil kajian dan analisis yang menjadi dasar pengembangan program pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

Terhadap KKP secara lebih luas, BBRSEKP berperan dalam:

1. Mendukung penguatan struktur ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui analisis daya saing, tata niaga, investasi, dan kebijakan ekonomi sektor.
2. Mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui kajian sosial ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat pesisir, tata kelola sumber daya, dan instrumen kebijakan berbasis keberlanjutan.
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan melalui penyusunan analisis dampak kebijakan, evaluasi program, serta rekomendasi strategis dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

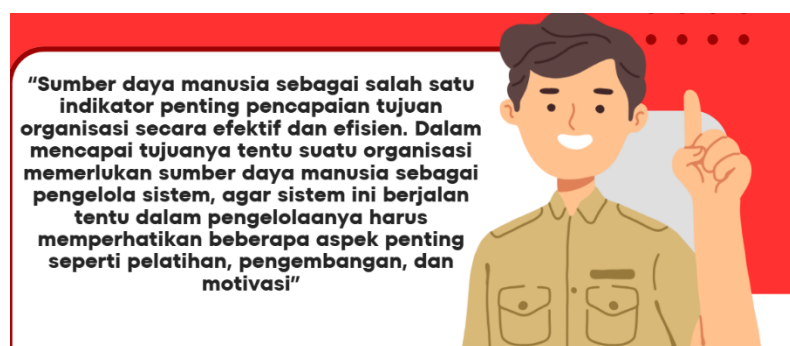
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



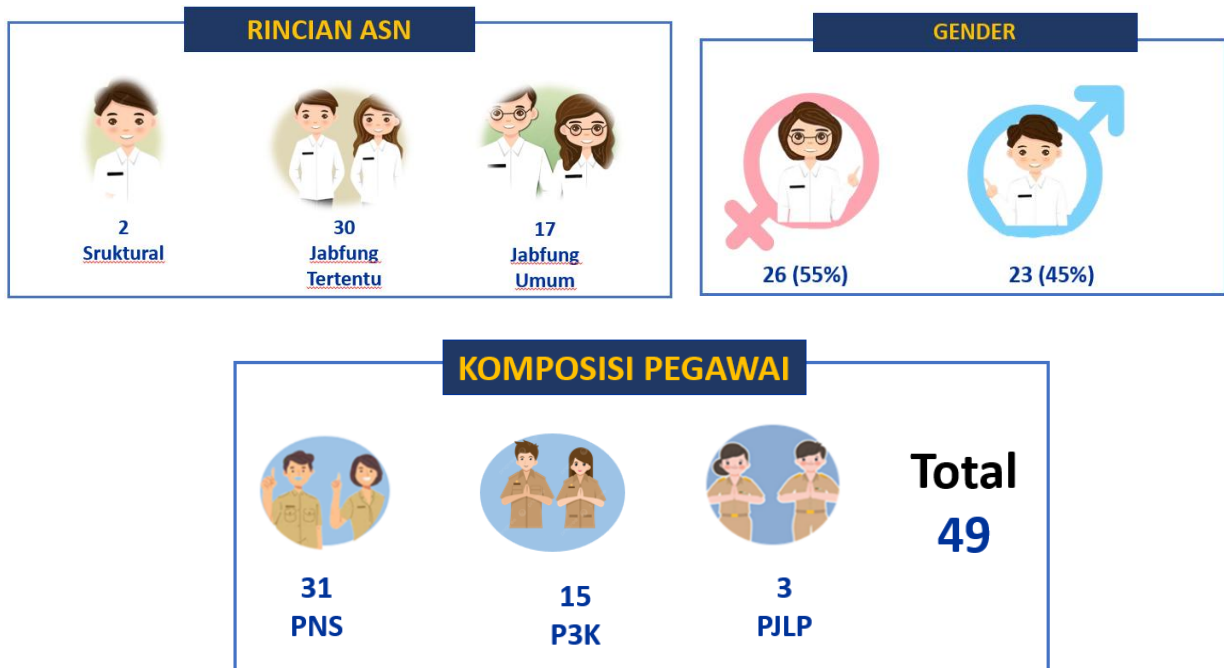
Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragaan SDM



Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025 berjumlah 49 orang, terbagi dalam 3 (tiga) yaitu SDM Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, P3K, serta Tenaga PJLP. Pada tahun 2025, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan

berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai berikut :



Gambar 3 . Rincian ASN BBRSEKP

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampaknya pada tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2025 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksistensi dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon I kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 7 orang (14,29%) dibandingkan dengan tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 12,24%, yang mana peningkatan bersumber dari pengangkatan P3K pada tahun 2025, namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dari tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2026, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada triwulan I tahun 2026 berkurang sebesar 2% dibandingkan pada akhir tahun 2025.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
2. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;
3. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

- SOTK BBRSEKP belum mengalami reorganisasi sejak terbentuknya BRIN berdasarkan Perpres BRIN Nomor No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mentransfer semua tugas dan fungsi riset dari Kementerian / Lembaga ke BRIN sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk;
- Saat ini nomenklatur (nama) BBRSEKP juga masih menyandang nama 'riset';
- Hal ini menyebabkan tugas dan fungsi teknis BBRSEKP belum bisa dirumuskan dan dilaksanakan karena sudah tidak mempunyai tugas riset, namun belum terdefinisi dengan jelas tugas yang baru.

- Dampak lain dari hal ini adalah belum terakomodasinya peta jabatan pegawai secara optimal, karena beberapa pegawai telah melakukan uji kompetensi dalam jabfungsnya masing-masing dan juga ada pegawai yang telah selesai tugas belajar, namun ini semua belum bisa diangkat dalam jabfung barunya karena belum adanya peta jabatan yang baru. Dan peta jabatan yang baru bisa disusun jika tusi organisasinya sudah jelas.
- Di sisi lain BBRSEKP sejak masa menjadi unit litbang hingga kini terus mendapatkan tugas untuk membantu program-program prioritas di KKP yang sifatnya adalah lintas eselon 1, yang saat ini utamanya adalah Program Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk tugas-tugas ini BBRSEK telah melaksanakan tugas-tugas tersebut secara optimal.
- Saat ini terdapat inisiasi untuk reorganisasi dimana BBRSEKP tidak lagi menjadi bagian dari BPPSDM, karena terdapat kesulitan secara regulasi SOTK BPPSDM yang berfokus pada penyuluhan dan pengembangan SDM. Inisiasi ini masih akan difinalkan lanjut dengan pembahasan antara BPPSDM, Biro SDMO dan BBRSEKP. Ditargetkan reorganisasi ini selesai dalam kurun waktu maksimal 6 bulan sejak November 2025.

Atas permasalahan tersebut BBRSEKP merekomendasikan agar pembahasan SOTK BBRSEKP dapat segera difinalkan sehingga tusi BBRSEKP ada kejelasan dan bisa tetap membantu KKP dalam melaksanakan program-program prioritas dengan para pegawai BBRSEKP terakomodasi peta jabatannya.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Cover Laporan**
2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.
3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .

4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.

5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. **Lampiran**

- a. Perjanjian Kinerja; dan
- b. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB 2

Perencanaan

Kinerja

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan (BBRSEKP) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BBRSEKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Badan Pelatihan Dan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan (BPPSMKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mewujudkan SDM yang kompeten.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi untuk mewujudkan SDM kompeten yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi

kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BPPSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2025 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”



Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi asta cita BPPSDM yang menjalankan misi asta cita Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

Asta Cita -2 yakni “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan asta cita pada ekonomi biru, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan

3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. BPPSDMKP tahun 2025 – 2029 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

- SP-1** Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- SP-2** Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat;
- SP-3** Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- SP-4** Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP.

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-2** dan **SP-4** diturunkan menjadi SK -1 dan SK-2 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

- SK-1** Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- SK-3** Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Rancangan Indikator Dan Target Kinerja 2025-2029



Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2025 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 4. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2026

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah **“Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”** dengan Indikator Kinerja :

1. Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi) pada tahun 2026 sebanyak 2 paket.

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan”** dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2026 sebesar 86%;
2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) pada tahun 2026 senilai 80;
3. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 85;
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 92,10;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 71,75;
6. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 82;
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) pada tahun 2026 sebesar 77%;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 71.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000) Awal
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	200.000
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	8.706.072
Total Anggaran Tahun 2026		8.906.072

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2026 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2026 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BPPSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 5 Januari 2026.

Adapun Indikator Kinerja tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	2
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86
		3	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,10
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,75
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	71

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Legend	
	110 - 120 (Istimewa)
	90 - 110 (Baik)
	70 - 90 (Cukup)
	50 - 70 (Kurang)
	0 - 50 (Sangat Kurang)

Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 10/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





BAB 3

Akuntabilitas

Kinerja

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025

3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

3.3 Realisasi Keuangan

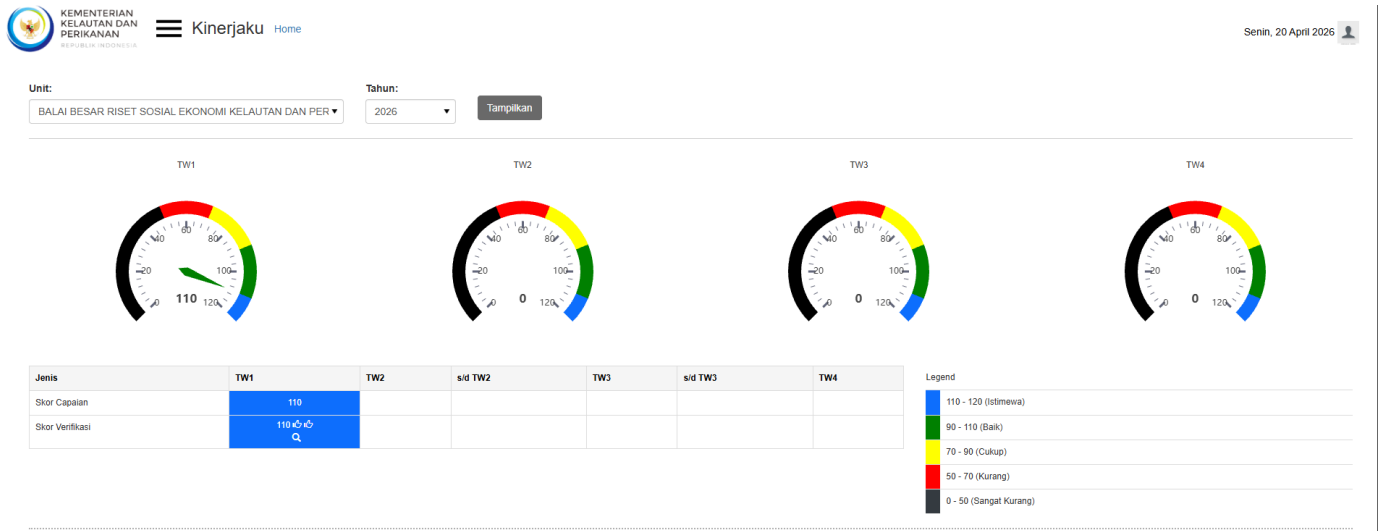
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2026

Pada tahun 2026, BBRSEKP telah menetapkan 9 (Sembilan) IK, dimana realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **110,00% (Istimewa)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Gambar 5. Dashboard Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2026 sebagaimana pada aplikasi <http://Kinerjaku.kkp.go.id>

Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP 10/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2026.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja triwulan I tahun 2026 dengan kinerja triwulan I tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP tahun 2026 menurut penetapan dua sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan Januari 2026 saat ini memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu SK.01. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan SK.02. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta Satker memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2026. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Capaian Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Capaian TW I Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1.

Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)

IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) merupakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut, memperkenalkan teknik-teknik baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa Rekomendasi kebijakan model proses bisnis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat yang mencakup pengembangan kapasitas, pemanfaatan teknologi/digital, penguatan kelembagaan dan akses pendanaan yang ditangani kepala BPPSDMKP.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun. Adapun progress kegiatan sampai dengan TW I adalah koordinasi internal tim pelaksana kegiatan dalam menyiapkan draft dokumen kerangka acuan kegiatan, serta menunggu arahan BPPSDMKP lebih lanjut terkait dengan kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp200.000.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp14.650.000,- atau sama dengan 7,32%



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja 2.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan IK Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup BPPSDMKP sampai dengan waktu pengukuran.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulanan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IKU-2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2026				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW I Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
100	75	71,43	85	86.00	86	100.00	1.18%	86	100.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW I Tahun 2026		Kenaikan Capaian TW I Tahun 2025-2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
120	120	87,11	100.00	100	100	0.00		100	100.00

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada triwulan I tahun 2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dengan target 86 dan capaian 86 atau sama dengan 100%. Capaian sesuai dengan surat Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B. 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP”

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 terjadi kenaikan capaian sebesar 1.18%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target kinerja kegiatan tahun 2026 capaian sudah mencapai target atau sama dengan 100%.

Jika dibandingkan dengan K/L sejenis di lingkungan BPPSDMKP seperti pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) maka capaian pada BBRSEKP sama dengan capaian BBRP2BKP, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Sejenis di BPPSDMKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	86	86	100
BBRP2BKP	86	86	100

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain telah selesainya tidak ditemukannya hasil temuan pada BBRSEKP.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, serta adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen Keuangan” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp1.700.000 dari pagu Rp7.535.000, sedangkan capaian output sebesar 100%. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien dengan total efisiensi sebesar 54,88%, hal ini menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2

Indikator Kinerja 3.

Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) merupakan indikator yang dibentuk dari:

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 7. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5	1
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

Tabel 8. Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFRENSI/ SARASEHAN/WORKSHOP/ LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 9. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 10. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
	c. Berat		1

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode semesteran dalam tahun berjalan, yaitu semester I (Januari–juni), dan semester II (Juli–Desember). Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di triwulan atau semester berikutnya.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan laporan kegiatan layanan manajemen SDM triwulan I tahun 2026;
- Monitoring kehadiran pegawai periode januari-maret 2026;
- Monitoring keikutsertaan kompetensi pegawai periode januari-maret 2026;
- Penyusunan RHK dan IKI pegawai BBRSEKP tahun 2026;
- Pengisian capaian IKI pegawai periode TW I tahun 2026.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen SDM ” dengan pagu anggaran sebesar Rp17.048.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 6.80% atau sama dengan Rp1.160.000.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3

Indikator Kinerja 4.

Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Keterbukaan informasi suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan

- Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan laporan triwulan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi triwulan I tahun 2026;
- Upload konten pada media sosial BBRSEKP periode januari-maret tahun 2026;
- Rapat terkait persiapan dokumen penilaian keterbukaan informasi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi ” dengan pagu anggaran sebesar Rp7.453.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I belum terealisasi.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4

Indikator Kinerja 5.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) merupakan IK Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode semesteran dalam tahun berjalan, yaitu semester I (Januari–juni), dan semester II (Juli–Desember). Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di triwulan atau semester berikutnya.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan laporan layanan perkantoran triwulan I tahun 2026;
- Pengelolaan up dan tup BBRSEKP periode januari-maret 2026;
- Penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terkait pemeliharaan dan tenaga PJLP periode januari-maret 2026;
- Rapat pembahasan revisi anggaran lingkup BPPSDMKP serta
- Penyusunan laporan ketersediaan dana detail.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perkantoran” dengan pagu anggaran sebesar Rp8.213.109.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 27,97% atau sama dengan Rp2.297.583.621.



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5

Indikator Kinerja 6.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

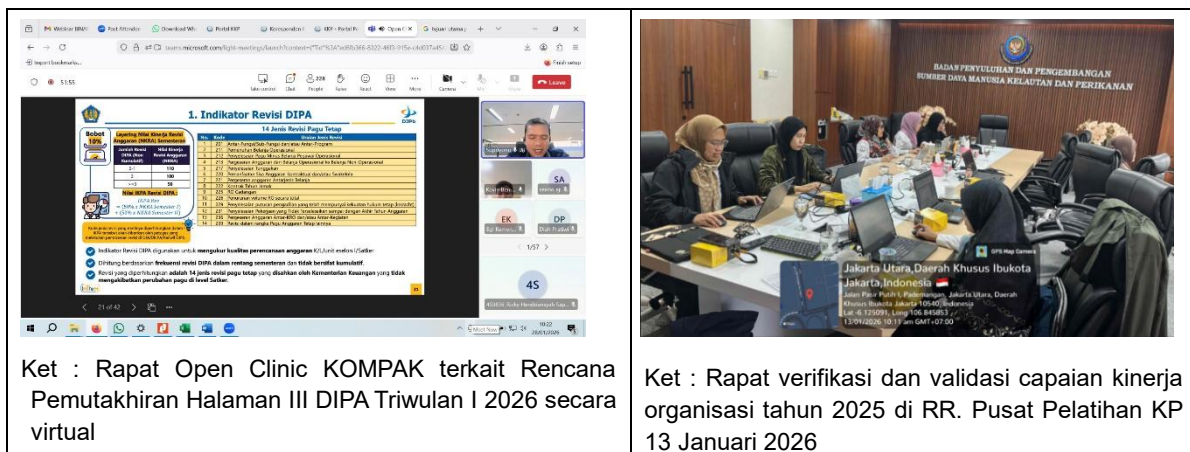
IK adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan laporan triwulan I tahun 2026 layanan pemantauan dan evaluasi;
- Pengisian capaian output pada aplikasi omspan periode januari-maret tahun 2026;
- Penyusunan dokumen kertas kerja progres RO periode januari-maret tahun 2026;
- Rapat pembahasan rencana kegiatan tahun 2026 serta
- Input pelaksanaan kegiatan pada aplikasi omspan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi (501-MA Monev dan Pelaporan) ” dengan pagu anggaran sebesar Rp29.835.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 15,62% atau sama dengan Rp4.660.000.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6

Indikator Kinerja 7.

Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKUP BBRSEKP indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan dokumen perencanaan meliputi;
 - ✓ Perjanjian Kinerja
 - ✓ Manual IK
 - ✓ Rincian target IK serta
 - ✓ Rencana aksi
- Verifikasi dan validasi capaian IK tahun 2025;
- Penyusunan laporan instansi kinerja pemerintah (LKj) Tahun 2025;
- Reviu laporan kinerja tahun 2025;
- Tindak lanjut catatan hasil reviu PM SAKIP tahun 2025;
- Rapat persiapan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2026;
- Pengisian indikator dan capaian kinerja pada aplikasi kinerjajaku;
- Verifikasi dan validasi capaian kinerja triwulan I tahun 2026;
- Penyusunan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2026;
- Penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2026.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi (501-MB SAKIP) ” dengan pagu anggaran sebesar Rp3.700.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I belum terealisasi.



Ket : Verifikasi dokumen TL CHR atas laporan kinerja BBRSEKP di tahun 2025	Ket : Verifikasi dan validasi capaian kinerja eselon 2 lingkup BPPSDMKP triwulan I tahun 2026.
--	--

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7

Indikator Kinerja 8.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)

IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulanan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

IKU-8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)		
Realisasi Capaian	2026	Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029

2023	2024	2025	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW I Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	100	77.00	100	120.00	0.00%	77	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW I Tahun 2026		Kenaikan Capaian TW I Tahun 2025- 2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	-	120.00	100	100	0.00		100	100.00

Tabel 11. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)

Capaian IK pada triwulan I tahun 2026 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 77 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan nota dinas Sekretaris BPPSDMKP nomor: 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya maka capaian IK tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan capaian kinerja.

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IK 8 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP

Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	77	100	120
BBRP2BKP	77	100	120

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain terselesaikannya identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang telah disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta tersusunnya revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, adanya rapat dan koordinasi dengan tim sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Umum” dengan pagu anggaran sebesar Rp22.296.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan

blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 3,05% atau sama dengan Rp680.000.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8

Indikator Kinerja 9.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai) merupakan Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

- Penyusunan laporan triwulan I tahun 2026 layanan kearsipan
- Mengikuti zoom meeting terkait pembahasan kearsipan dengan ANRI;
- Kompilasi dokumen untuk yang status pemusnahan arsip di BBRSEKP;
- Berkoordinasi dengan set BBPSDMKP terkait layanan kerasipan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Penyelenggaraan Kerasipan” dengan pagu anggaran sebesar Rp3.140.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I belum terealisasi.

3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP TW I Tahun 2026

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada triwulan I tahun 2026 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabel pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2026 adalah Rp 8.906.072.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.028.764.000,- dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.877.308.000,- dengan realisasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp 2.324.953.369 atau sama dengan 26,11%.

Tabel 13. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW I Tahun 2026

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	7.028.764.000,-	1.905.415.685,-	27,11%
Belanja Barang	1.877.308.000,-	447.645.369,-	19,25%
TOTAL	8.906.072.000,-	2.324.953.369,-	26,11%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 14. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	200.000.000,-	14.650.000,-	7,32%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	8.706.072.000,-	2.310.303.369	27.76%

	dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan			
--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 15. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	200.000.000,-	14.650.000,-	7,32
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	7.535.000,-	3.400.000,-	45,12
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	17.048.000,-	1.160.000,-	6,80
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	21.617.000,-	2.140.000,-	9,89
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	8.213.109.000,-	2.297.583.369	27,97
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	29.835.000	4.660.000	15,62
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	3.700.000	-	-
		8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	3.950.000	680.000	17,22

		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai	3.140.000	-	-
Total Realisasi Anggaran TW I Tahun 2026				8.906.072.000,-	2 ,324,953,369	26,11

Sumber : Aplikasi Omspan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Diktum 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran mengamanatkan pelaksanaan assessment RO, yaitu: *“Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi pra-laporan”*

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Secara efisiensi, sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum tergambar capaian atas efisiensi karena perhitungan efisiensi baru dapat diukur akhir tahun.

Pencapaian nilai efisiensi dengan rentang -20 atau +20 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dinilai cukup efisien dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan di triwulan berikut.





BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

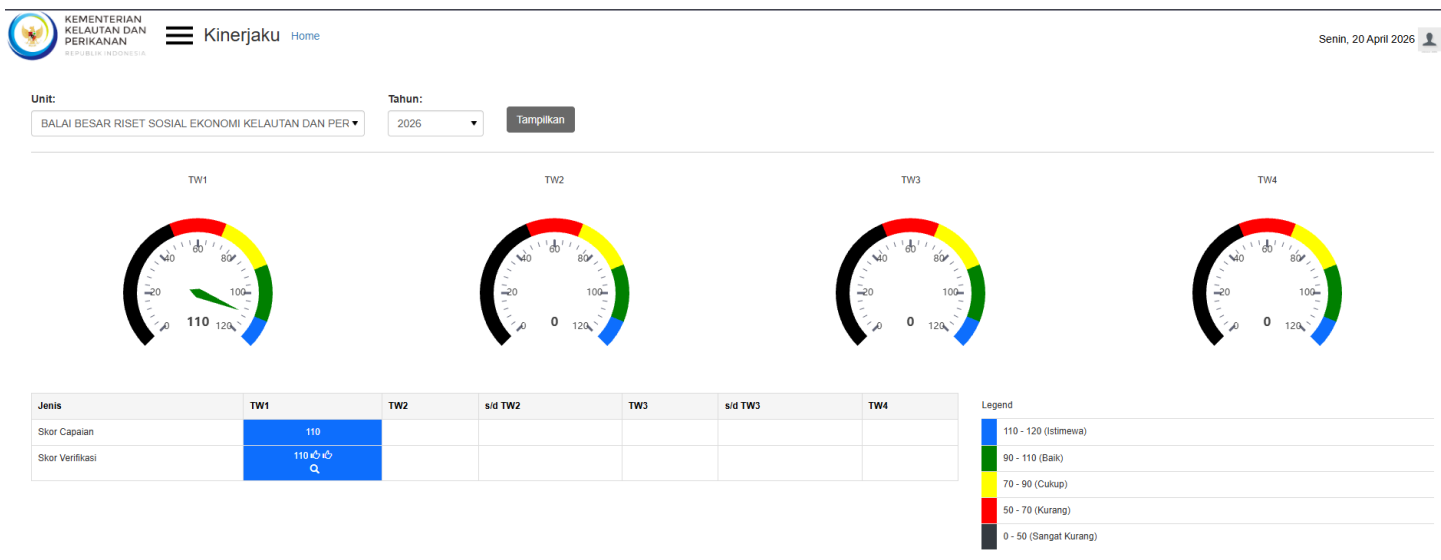
BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker pada triwulan I tahun 2026 sebesar **110%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 14 . Capaian Kinerja pada *Dashboard Kinerjaku* BBRSEKP TW I Tahun 2026



Selama triwulan I tahun 2026 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru) dan 1 IK berstatus baik (hijau) serta 7 IK baru akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi 2 IK tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 86% dan capaian sebesar 86% atau sama dengan 100%;
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun. 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Capaian TW I Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja pada triwulan I tahun 2026, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp2.324.953.369,- relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.906.072.000,-. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 26,11% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **"ISTIMEWA"**, yaitu dari SK "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan" dengan persentase capaian 120,00%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dalam rangka mendorong peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRSEKP secara berkala perlu dilakukan melalui penguatan pengendalian kinerja dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi pada triwulan berikutnya.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Novi Susetyo Adi**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1.	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	2
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86
		3.	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80
		4.	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	92
		5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,1
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,75
		7.	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.706.072.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		8.906.072.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi



Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Badan riset Dan SUMBER Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan

Baai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan

2026